PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR 9 TAHUN 1994

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT
DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa, peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dipandang perlu melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II;
 - b. Bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah Jis. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 333/KPTS/ 1992;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah tingkat II;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Peningkatan dan Penyempurnaan Lembaga Social Desa menjadi Lembaga Ketahan Masyarakat Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993;
10. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Bantul Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- b. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- c. Desa adalah Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- d. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat yang ada di Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

B A B II
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 2

- (1) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor.
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri dari urusan urusan.
 - c. Unsur Pelaksana : - Seksi-seksi yang terdiri dari Sub Seksi Sub Seksi.
- Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Susunan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari :
- a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tat Usaha.
 - c. Seksi Pengembangan Desa.
 - d. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa.
 - e. Seksi Usaha Ekonomi desa.
 - f. Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa.
 - g. Seksi Pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3). Bagan struktur Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 3

- (1). Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan Penyusunan Rencana dan Peraturan Perundang-undangan, melaksanakan Urusan Kesekretariatan yang meliputi Kepegawaian, Mengelola Urusan Keuangan, Urusan Rumah Tangga, Urusan Ketata Usahaan serta Pemantauan, Pengumpulan Data dan Penyusunan Laporan.
- (2). Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi Penyusunan Rencana dan Program di bidang Pembangunan Masyarakat Desa dan Penyusunan Laporan.
- b. Koordinasi dan penyiapan naskah Peraturan Perundang-Undangan dibidang Pembangunan Masyarakat desa.
- c. Pemantauan, penilaian, pengumpulan dan analisa data tentang hasil pelaksanaan tugas.
- d. Pelaksanaan urusan Kepegawaiaan.
- e. Pengelolaan urusan Keuangan.
- f. Pelaksanaan urusan Rumah Tangga.
- g. Pelaksanaan urusan ketata usahaan Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan perencanaan.
- b. Urusan kepegawaian.
- c. Urusan keuangan.
- d. Urusan Rumah Tangga dan tata usaha.

(2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 6

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program penyusunan data, pemantauan, pelaporan serta penyampaian naskah peraturan perundang-undangan dan Dokumentasi.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran.
- (4) Urusan Rumag Tangga dan tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, urusan dalam, pemeliharaan barang-barang inventaris dan urusan perjalanan dinas serta surat menyurat, pengetikan dan penggandaan.

Bagian ketiga
Seksi Pengembangan Desa
Pasal 7

- (1) Seksi Pengembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan desa meliputi pendataan, evaluasi dan lomba desa, unit daerah kerja pembangunandan tata desa serta pengembangan kawasan terpadu.
- (2) Seksi Pengembangan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 9 Seksi Pengembangan Desa mempunyai Fungsi :

- a. Pengumpulan data dan analisa data serta evaluasi program-program pembangunan yang masuk desa.
- b. Bimbingan dan penilaian pelaksanaan perlombaan desa.
- c. Penyusunan rencana dan program pengembangan manajemen Pembangunan Masyarakat Desa.
- d. Pemberian petunjuk dan bimbingan teknis penerapan pola tata desa serta pemantauan dan evaluasi tingkat perkembangan desa.
- e. Penyusunan bahan pembinaan masyarakat dan Bimbingan teknis pelaksanaan program pengembangan kawasan terpadu.
- f. Penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan pembangunan desa terpadu.

Pasal 9

- (1) Seksi Pengembangan DEsa terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa.
 - b. Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan dan Tata Desa.
 - c. Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu.
- (2) Sub Seksi Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengembangan Desa.

Pasal 10

- (1) Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa mempunyai Tugas melaksanakan pemantauan, menganalisa dan mengevaluasi data tingkat perkembangan desa serta mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan pembangunan desa.
- (2) Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan dan Tata Desa mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk operasional dan memberikan bimbingan teknis